

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA (KROONGETUIGE) DALAM  
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PERSIDANGAN**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat

Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

**EKO CONDRIO SAPUTRO**

**C. 100 100 079**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2015**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Hartanto', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

(Hartanto, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Marisa', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.


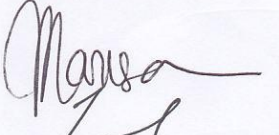

(Marisa Kurnianingsih, SH. M.kn.)

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari : Kamis  
Tanggal : 25 Juni 2015

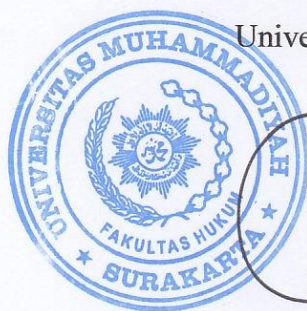
### Dewan Penguji

Ketua : Hartanto, S.H., M.Hum. (  )  
Sekretaris : Marisa Kurnianingsih, S.H., M.Kn. (  )  
Anggota : Khuswardhani, S.H., M.Hum (  )

### Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr.Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

**KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA (*KROONGETUIGE*) DALAM  
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PERSIDANGAN.**

**Eko Condro Saputro**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**2015**

**E-mail: condrosaputro@gmail.com**

**ABSTRAK**

Saksi mahkota adalah terdakwa lain sama-sama melakukan tindak pidana diadakan *splitsing* berdasar Pasal 142 KUHP); Putusan Mahkamah Agung No. 66K/Kr/1967 tanggal 25 Oktober 1967, dan Putusan Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990; Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK); (1) Perlindungan terhadap saksi mahkota dari aspek hak asasi manusia (HAM) mempunyai hak untuk tidak mempersalahkan dirinya sendiri sejak proses penyidikan sampai dengan proses persidangannya di pengadilan, sesuai Pasal 50 sampai dengan Pasal 68, Pasal 244, 263, 213 KUHP dan Pasal 17 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia; (2) Kedudukan saksi mahkota pada proses pembuktian tindak pidana pembunuhan di persidangan Pengadilan (a) didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam bentuk penyertaan dan terhadap perbuatan pidana diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*) yang diatur Pasal 142 KUHP; (b) Sesuai Pasal 10a Undang-undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, saksi mahkota berhak mendapatkan insentif hukum berupa keringanan hukuman. yakni kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan; (3) Kendala penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian perkara pembunuhan di persidangan: (a) Kendala pada Terdakwa yang tidak bersedia menjadi saksi mahkota, karena takut perbuatannya akan terungkap di pemeriksaan pengadilan; (b) Kendala pada Jaksa Penuntut Umum yakni Menentukan untuk pemisahan berkas perkara (*splitsing*) yang diatur dalam Pasal 142 KUHP dan Putusan Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 dan Kesulitan Jaksa Penuntut Umum dalam mendapatkan saksi mahkota; (c) Kendala pada Hakim Pengadilan yakni (1) Penggunaan saksi mahkota menyulitkan atau mempengaruhi/kurang fairnya putusan Hakim; (2) Keterangan saksi mahkota bisa berisi kebohongan yang tujuannya untuk menyelamatkan tindakan terdakwa lain.

Kata Kunci : *Saksi Mahkota (kroongetuige); Tindak Pidana Pembunuhan, Kedudukan di Persidangan.*

**POSITION CROWN WITNESS (KROONGETUIGE) IN CRIME MURDER  
EVIDENCE AT TRIAL**

**Eko Condro Saputro**

**Faculty of Law**

**University of Muhammadiyah Surakarta**

**2015**

**E-mail: condrosaputro@gmail.com**

**ABSTRACT**

Crown witness is another equally defendant committed the crime splitsing held under Article 142 Criminal Procedure Code); Supreme Court Decision No. 66K / Cr / 1967 dated October 25, 1967, and the Supreme Court Decision No. 1986 K / Pid / 1989 dated March 21, 1990; Witness and Victim Protection Agency (hereinafter Agency) (1) Protection against the crown witness of aspects of human rights has the right to not incriminate himself from the investigation to the trial in the court process, in accordance with Article 50 and Article 68, section 244, 263, 213 Criminal Procedure Code and Article 17 of Law No. 39 Year 1999 on human rights; (2) The position of the crown witness in the process of proving the crime of murder in the trial court (a) are based on certain conditions, namely in the form of inclusion and against criminal actions examined by the separation mechanism (*splitsing*) as stipulated in Article 142 Criminal Procedure Code. (b) In accordance with Article 10 paragraph (2) Witness Protection Act, the crown witness is entitled to legal incentives in the form of leniency. that his testimony could be considered a judge in a criminal ease to be dropped. (3) Constraints use crown witness in a murder case evidence at trial: (a) Constraints on a defendant who is not willing to be a crown witness, for fear his deeds will be revealed at the trial. (b) Constraints on the Public Prosecutor for the separation Determining docket (*splitsing*) stipulated in Article 142, Criminal Procedure Code and Supreme Court Decision No. 1986 K / Pid / 1989 dated March 21, 1990 and the Public Prosecutor difficulty in getting witnesses crown (c) Constraints on the Court of Justice (1) The use of crown witness difficult or affect / less fairnya Judge's decision. (2) Statement of witness lies the crown could contain measures that aim to save another defendant then be threatened in violation.

Keywords: *Crown Witness (kroongetuige); Crime Murder, Position at trial.*

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Condro saputro

NIM : C. 100 100 079

Alamat : Sambirejo RT 03/RW 01, Dawung, Jenar, Sragen

Dengan ini menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 13 Juni 2015

Yang membuat pernyataan



(Eko Condro Saputro)

NIM: C. 100 100 079

## **MOTTO**

*“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan  
jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri”*

*(QS.Al Isra' : 7)*

*“Dan kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan  
harta, jiwa dan buah-buahan, Dan sampaikanlah kabar gembira kepada  
orang-orang yang sabar”*

*(Al-Baqarah : 155)*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- Bapak, Ibu, dan Keluarga
- Istri dan anak tercinta yang telah sabar mendampingi dan selalu berdoa dan juga semangat yang diberikan
- Para sahabat dan kerabat
- Para almamater



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dimudahkan dan senantiasa diberi bantuan dalam penyusunan skripsi sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA (KROONGETUIGE) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PERSIDANGAN**

Skripsi ini disusun sebagian persyaratan mendapat gelar kesarjanaan jenjang strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali dibantu dan didukung oleh berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang atas karunia, hidayah dan rahmat-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kebenaran cahaya terang bagi kehidupan manusia.
3. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Bapak Hartanto, S.H., M.Hum, selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan, bimbingan, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Marisa kurnianingsih, SH. M.Kn selaku pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Kuswardhani, S.H., M.Hum, selaku pembimbing akademik yang bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam proses perkuliahan yang ditempuh penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini, semoga penulis mampu menerapkan ilmu yang bapak/ibu berikan.
8. Seluruh Staf/karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, terima kasih atas bantuan dan pelayanan yang diberikan kepada penulis.
9. Staf dan jajaran Pengadilan Negeri Sragen dan Surakarta, terima kasih atas bantuan dan pelayanan yang diberikan kepada penulis.
10. Narasumber yang telah memberikan informasi secara lengkap dan akurat kepada penulis.
11. Kedua Orangtua tercinta, Bapak Hadi sutikno dan Ibu Sudarti yang selalu memberikan motivasi, dukungan, do'a dan kepercayaan terhadap penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan mendapatkan gelar sarjana hukum.
12. Istri dan anaku tercinta, Wening Galuh widari dan Elang Lawu Kirana Saputra yang selalu memberikan doa, motivasi tanpa henti dan juga dorongan semangat yang luar biasa

13. Adik tercinta, Ulfaina Indah Pertiwi, Melia Indah Pertiwi dan Hanifah Rimba Sakti menghibur penulis ketika penulis merasa jenuh dalam proses pengerjaan skripsi.
14. Untuk para Sahabat Dona, Ardian, Diky, Fredy, Lintang, Rocky, Putra, Brian, Billy, Ganes, Ary dan banyak sahabat Universitas Muhammadiyah Surakarta lainnya yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas semangat dan dukungannya.

Penulis sangat menyadari bahwasanya skripsi ini tidak sempurna. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan meminta saran dan kritik yang membangun agar kedepan dapat lebih baik. Akhirnya, penulis berharap dari ketidaksempurnaan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan baik itu untuk penulis sendiri maupun para pembaca yang budiman.

Surakarta, 13 Juni 2014



Eko Condro saputro

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABTRACT.....	v
PERNYATAAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Pikiran.....	6
F. Metode Penelitian.....	9
1. Metode Pendekatan.....	9
2. Penelitan.....	9
3. Lokasi Penelitian.....	10
4. Jenis Data dan Sumber data.....	10
5. Metode Pengumpulan data.....	12
6. Metode Analisis data.....	12
G. Sistematika Skripsi.....	12

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Pembuktian.....	14
1. Pengertian tentang Pembuktian.....	14
2. Macam-macam sistem Pembuktian.....	15
B. Tinjauan Umum tentang Saksi.....	18
1. Pengertian tentang Saksi.....	18
2. Macam-macam saksi.....	20
3. Pengertian tentang saksi Mahkota.....	22
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pembunuhan.....	26
1. Pengertian Tindak Pidana.....	26
2. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	28

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pemanfaatan saksi mahkota dalam perspektif Hak asasi Manusia .....	31
B. Kedudukan saksi mahkota pada proses pembuktian tindak pidana pembunuhan di persidangan Pengadilan .....	43
C. Kendala penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian perkara pembunuhan di persidangan.....	53
1. Kendala pada Terdakwa.....	53
2. Kendala pada Jaksa Penuntut Umum.....	55
3. Kendala pada Hakim Pengadilan .....	58

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	63

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
-----------------------------	-----------